



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 219 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP,**

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS, DAN**

**JADWAL RETENSI ARSIP**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip perlu membuat klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib arsip yang efektif dan efisien, perlu disusun klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis, dan jadwal retensi arsip di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam satu pedoman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP, SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS, DAN JADWAL RETENSI ARSIP.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip sebagai Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Pedoman Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 2023  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

  
Suharti  


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI  
ARSIP, SISTEM KLASIFIKASI  
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP  
DINAMIS, DAN JADWAL RETENSI  
ARSIP

NOMOR : 219 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 APRIL 2023

## BAB I DEFINISI

Dalam Keputusan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh LKPP dan/atau lembaga kearsipan.
5. Arsip Fasilitatif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang fasilitatif yang meliputi sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, hukum, organisasi dan tata laksana, pengawasan, tata usaha, protokol, perpustakaan, teknologi informasi, layanan pengadaan secara elektronik LKPP, dan arsip

fasilitatif lainnya.

6. Arsip Substantif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang substantif yang meliputi pengembangan strategi dan kebijakan pengadaan umum, pengembangan strategi dan kebijakan pengadaan khusus, pengembangan iklim usaha, dan pengembangan kerja sama internasional, perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, monitoring dan evaluasi pengadaan, riset dan kontrak, pengelolaan katalog, pengembangan sistem pengadaan secara elektronik, standar kompetensi dan kelembagaan, pengembangan pengelolaan pengadaan, sistem dan sarana sertifikasi, hukum dan penyelesaian sengketa, pusdiklat pengadaan barang/jasa LKPP, dan arsip substantif lainnya.
7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
8. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
9. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
11. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
12. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
13. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
14. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
15. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.

16. Biasa/Umum/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
17. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
18. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro dan apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
19. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
20. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
21. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari LKPP.
22. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar LKPP.
23. Hak Akses adalah hak penggunaan arsip yang diberikan kepada pengguna tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
25. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.
26. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan.
27. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
28. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.

29. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
30. Panitia Penilai Arsip adalah panitia yang melakukan penilaian/analisis terhadap arsip yang akan dimusnahkan terdiri dari Unit Pengolah, Unit Kearsipan dan Arsiparis.

## BAB II KETENTUAN

1. Klasifikasi arsip LKPP merupakan acuan bagi seluruh unit kerja LKPP dalam rangka pengelolaan arsip dinamis.
2. Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
3. Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi tanda pengenal arsip sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja serta digunakan sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip fasilitatif dan arsip substantif LKPP.
4. Klasifikasi Keamanan Arsip, memuat informasi Biasa/Umum/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia.
5. Klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.
6. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di LKPP dimaksudkan untuk:
  - a. mendorong unit-unit organisasi agar memberkaskan Arsip Dinamis di unit organisasinya secara tertib yang disertai dengan daftar Arsip aktifnya;
  - b. memberikan petunjuk kepada unit-unit organisasi agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap Klasifikasi Arsip yang telah ditetapkan;
  - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan reliabilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
  - d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

7. Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di LKPP bertujuan untuk:
  - a. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis secara cepat, tepat, murah, dan aman;
  - b. tersedianya arsip LKPP yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan Lampiran Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
  - c. terjaminnya keamanan Arsip bagi Informasi yang Dikecualikan; dan
  - d. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di LKPP.
8. Asas klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis di LKPP dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
9. Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
10. Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta prosedur operasional standar, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
11. JRA LKPP digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan LKPP.
12. JRA LKPP memuat kode klasifikasi, jenis dokumen/arsip, retensi arsip dan keterangan.
13. JRA LKPP sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdiri atas:
  - a. JRA Fasilitatif; dan
  - b. JRA Substantif.
14. Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam angka 12 ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif.
15. Penentuan retensi aktif dan retensi inaktif dilakukan oleh Unit Pengolah dengan Unit Kearsipan serta mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
16. Penentuan retensi aktif dan retensi inaktif sebagaimana dimaksud pada angka 14 didasarkan pada pertimbangan nilai guna arsip di Unit Pengolah.
17. Retensi arsip dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi oleh Unit Pengolah hingga pokok masalah pada naskah/berkas telah selesai diproses.
18. Keterangan arsip sebagaimana dimaksud dalam angka 12 merupakan status arsip setelah retensinya habis.

19. Keterangan musnah yaitu status arsip yang tidak memiliki nilai guna setelah retensinya habis.
20. Keterangan permanen yaitu status arsip yang masih memiliki nilai kesejarahan setelah masa retensinya habis.
21. Keterangan dinilai yaitu status arsip yang kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan.
22. Jenis arsip fasilitatif LKPP meliputi:
  - a. Sumber Daya Manusia;
  - b. perencanaan;
  - c. keuangan;
  - d. pengelolaan Barang Milik Negara;
  - e. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
  - f. rumah tangga;
  - g. hubungan masyarakat;
  - h. hukum;
  - i. organisasi dan tata laksana;
  - j. pengawasan;
  - k. tata usaha;
  - l. perpustakaan;
  - m. sistem informasi; dan
  - n. arsip fasilitatif lainnya.
23. Jenis arsip substantif LKPP meliputi:
  - a. Pengembangan strategi dan kebijakan pengadaan umum;
  - b. Pengembangan strategi dan kebijakan pengadaan khusus;
  - c. pengembangan iklim usaha;
  - d. pengembangan kerja sama internasional di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);
  - e. perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - f. monitoring dan evaluasi pengadaan;
  - g. Pengelolaan Katalog Nasional (PKN);
  - h. pengelolaan sistem katalog;
  - i. pengembangan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE);
  - j. standar kompetensi dan kelembagaan;
  - k. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pengadaan;
  - l. sistem dan sarana sertifikasi;
  - m. hukum dan penyelesaian sengketa;
  - n. pusat pendidikan dan latihan pengadaan barang/jasa LKPP; dan

- o. arsip substantif lainnya.
24. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di LKPP diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Arsip yang tercipta di LKPP dapat diklasifikasikan menjadi informasi Biasa/Umum/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia;
  - b. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
  - c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
  - d. Arsip Dinamis di LKPP dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal;
  - e. setiap Pengguna Internal hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; dan
  - f. Pengguna Eksternal dapat mengakses informasi LKPP yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
25. Arsip Dinamis LKPP terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yang meliputi:
- a. Biasa/Umum/Terbuka;
  - b. Terbatas; dan
  - c. Rahasia.
26. Kategori sebagaimana dimaksud pada angka 25 menentukan:
- a. Teknis pengamanan; dan
  - b. Pengaturan akses.
27. Arsip Dinamis di LKPP yang termasuk dalam kategori Arsip Biasa/Umum/Terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 25, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja antara lain:
- a. Arsip Dinamis dari Sekretariat Utama LKPP;
  - b. Arsip Dinamis dari Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan yang meliputi Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, dan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;

- c. Arsip Dinamis dari Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital yang meliputi Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan; Direktorat Sistem Pengadaan Digital; dan Direktorat Pasar Digital Pengadaan;
  - d. Arsip Dinamis dari Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia yang meliputi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dan Direktorat Sertifikasi Profesi;
  - e. Arsip Dinamis dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa meliputi Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah, dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
  - f. Arsip Dinamis dari Inspektorat;
  - g. Arsip Dinamis dari Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - h. Arsip Dinamis dari Pusat Data dan Informasi.
28. Arsip Dinamis di LKPP yang termasuk dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf b merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di LKPP jika diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
29. Arsip Dinamis di LKPP yang termasuk dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf c, mengandung dampak yang luas dan serius sehingga mengganggu kinerja LKPP.
30. Pengamanan informasi arsip Dinamis di LKPP meliputi pembuatan daftar arsip yang disusun dari Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagai berikut:
- a. daftar Arsip informasi publik dari Arsip Dinamis yang berkategori terbuka; dan
  - b. daftar Arsip Terbatas dan Rahasia, dari Arsip Dinamis yang berkategori tertutup.
31. Tujuan pengamanan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada angka 30 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Record Centre* dan *Central File*.
32. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fasilitatif di LKPP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

33. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Substantif tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
34. Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf d, meliputi:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris Utama dan Deputi;
  - c. Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, dan pejabat setara Eselon II lainnya;
  - d. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, serta Staf; dan
  - e. Pengawas Internal.
35. Kepala sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip LKPP.
36. Sekretaris Utama dan Deputi sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf b dan Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf c, berwenang:
  - a. mengakses Arsip yang terdapat pada Unit Pengolah di bawah kewenangannya; dan
  - b. tidak dapat mengakses Arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya.
37. Sekretaris Utama dan Deputi sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf b dan Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf c, dapat mengakses Arsip yang berada di luar kewenangannya, setelah mendapatkan izin dari Pejabat pada Unit Pengolah yang bersangkutan.
38. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, dan Staf sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf d berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi Biasa/Terbuka.
39. Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf e, berwenang mengakses seluruh Arsip di LKPP dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf f, meliputi:
  - a. pengawas eksternal;
  - b. aparat penegak hukum; dan
  - c. publik.
41. Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada angka 40 huruf a, berwenang mengakses seluruh arsip di LKPP dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada angka 40 huruf b, berwenang mengakses arsip di LKPP yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
43. Publik sebagaimana dimaksud pada angka 40 huruf c, dapat mengakses arsip di LKPP yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

KLASIFIKASI ARSIP, SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS, DAN JADWAL RETENSI ARSIP LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA											
NO.	JENIS ARSIP			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	HAK AKSES EKSTERNAL	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				AKTIF	INAKTIF						
I	<b>FASILITATIF</b>										
	<b>HR</b>	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>									
		<b>HR 01</b>	Formasi Pegawai								
			01.01 Usulan dari Unit Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			01.02 Usulan Permintaan Formasi Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			01.03 Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			01.04 Penetapan Formasi Aparatur Sipil Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			01.05 Penetapan Formasi Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Biasa/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

		<b>HR 02</b>	Pengadaan Pegawai									
			02.01	Penerimaan Pegawai meliputi:	2 Tahun Setelah Diangkat Sebagai Aparatur Sipil Negara	3 Tahun	Musnah	Biasa/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
				- Pengumuman								
				- Seleksi Administrasi								
				- Pemanggilan Peserta Tes								
				- Pelaksanaan Ujian Tertulis								
				- Keputusan Hasil Ujian								
				- Wawancara								
				- Pengujian Kesehatan Akhir								
			02.02	Lamaran yang tidak diterima	2 Tahun	-	Musnah	Biasa/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			02.03	Penetapan Nomor Induk Pegawai	2 Tahun Sejak Nomor Induk Pegawai Ditetapkan	-	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
				- Surat Lamaran								
				- Ijazah								
				- Surat Keterangan Catatan								
				- Kartu Kuning								
				- Surat Keterangan Kesehatan								Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			02.04	Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara Menjadi Aparatur Sipil Negara Lebih Dari 2 (dua) Tahun	2 Tahun Sejak Keputusan Ditetapkan	-	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			02.05	Keputusan Calon Aparatur Sipil Negara/Aparatur Sipil Negara	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Biasa/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HR 03</b>	Pembinaan Karier Pegawai									
			03.01	Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai	2 Tahun Setelah Dilaksanakan	-	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			03.02	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/ Sertifikat	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Biasa/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

			03.03	Sasaran Kinerja Pegawai	2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggung jawabkan/ Diaudit	-	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Berkaitan dengan hak-hak pribadi, dan dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			03.04	Daftar Usul Penilaian Angka Kredit	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	-	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Berkaitan dengan hak-hak pribadi, dan dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			03.05	Disiplin Pegawai	2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan/ Diaudit	3 Tahun	Musnah	Rahasia	Eselon II	-	Berkaitan dengan hak-hak pribadi, dan dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			-	Daftar Hadir								
			-	Rekapitulasi Daftar Hadir								
			03.06	Hukuman Disiplin	2 Tahun Sejak Kegiatan Dipertanggungjawabkan/ Diaudit	2 Tahun	Musnah	Rahasia	Eselon II	-	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			03.07	Penghargaan dan Tanda Jasa	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

		<b>HR 04</b>	Sistem Informasi Kepegawaian									
			04.01	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			04.02	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			04.03	Pengembangan Sistem Arsip Kepegawaian	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HR 05</b>	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai		1 Tahun Setelah Memperoleh Keputusan Tetap	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HR 06</b>	Mutasi Pegawai									
			06.01	Alih Status	2 tahun setelah keputusan ditetapkan	-	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
				- Pindah Instansi								
				- Pindah Wilayah Kerja								
				- Dipekerjakan								
				- Penugasan Sementara								
				- Mutasi Antarunit Kerja								
			06.02	Mutasi Keluarga	2 Tahun	-	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
				1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian								
				2) Surat Penolakan Izin								
				3) Surat Nikah/Cerai								
				4) Akte Kelahiran Anak								
				5) Surat Keterangan Adopsi Anak								
				6) Surat Keterangan Meninggal								
			06.03	Usulan Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	2 Tahun Setelah Keputusan Ditetapkan	-	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

			06.04	Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural/Fungsional	2 Tahun Setelah Keputusan Ditetapkan	-	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			06.05	Usulan Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/ Kedudukan Hukum Pegawai	2 Tahun Setelah Keputusan Ditetapkan	-	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			06.06	Peninjauan Masa Kerja	2 Tahun Setelah Keputusan Ditetapkan	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			06.07	Tim Penilai Kinerja	1 Tahun Setelah Keputusan Ditetapkan	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HR 07</b>	Administrasi Pegawai									
			06.01	Cuti Besar	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon I	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			06.02	Cuti Sakit, Cuti tahunan, Cuti Bersalin	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			06.03	Cuti Alasan Penting	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	-	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			06.04	Cuti di Luar Tanggungan Negara	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			06.05	Identitas Pegawai	2 Tahun Setelah Identitas Ditetapkan	-	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

				- Usul penetapan Kartu								
				- Keanggotaan Organisasi								
				- Laporan Pajak Penghasilan Pribadi								
				- Keterangan penerimaan								
			06.07	Daftar Urut Kepangkatan	2 Tahun	-	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HR 08</b>	Kesejahteraan Pegawai									
			08.01	Layanan Pemeliharaan Kesehatan	2 Tahun	-	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			08.02	Layanan Asuransi	2 Tahun	-	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			08.03	Layanan Tabungan Perumahan	2 Tahun	-	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			08.04	Layanan Bantuan Sosial	2 Tahun	-	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			08.05	Layanan Pakaian Dinas	2 Tahun	-	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			08.06	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	2 Tahun	-	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			08.07	Pemberian Tali Kasih	2 Tahun	-	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			08.08	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	2 Tahun	-	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

			08.09	Layanan Olahraga dan Rekreasi	2 Tahun	-	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			08.10	<i>Medical Record</i>	2 Tahun	-	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HR 09</b>		Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	1 Tahun Setelah Keputusan Ditetapkan	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HR 10</b>		Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	1 Tahun Setelah Memperoleh Keputusan Bersifat Tetap	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HR 11</b>		Usul pemberhentian dan penetapan pensiun Pegawai/Janda/Duda/dan Aparatur Sipil Negara yang meninggal	2 Tahun Setelah Keputusan Ditetapkan	-	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HR 12</b>		Berkas Perseorangan Pegawai Aparatur Sipil								
			12.01	Lamaran Calon Aparatur Sipil Negara	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.02	Nota Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Kelengkapannya	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.03	Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.04	Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

			12.05	Keputusan Peninjauan Masa Kerja	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.06	Keputusan Kenaikan Pangkat	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.07	Pernyataan Melaksanakan Tugas	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.08	Pernyataan Pelantikan	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.09	Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural atau Fungsional	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.10	Keputusan Perpindahan Wilayah Kerja	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.11	Keputusan Perpindahan antar Instansi	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.12	Keputusan Cuti di Luar Tanggungan Negara	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.13	Berita Acara Pemeriksaan	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.14	Keputusan Hukuman Jabatan atau Hukuman Disiplin	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

			12.15	Keputusan Perbantuan atau dipekerjakan ke Luar Instansi Induk	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.16	Keputusan Penarikan kembali dari Perbantuan atau dipekerjakan	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.17	Keputusan Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.18	Keputusan Pengalihan Aparatur Sipil Negara	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.19	Keputusan Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.20	Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai Calon Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara, Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.21	Keterangan Pernyataan Hilang	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.22	Keterangan Kembalinya Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan hilang	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.23	Keputusan Penggantian Nama	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.24	Perbaikan Tanggal Tahun Lahir	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

			12.25	Akta Nikah atau Cerai	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.26	Akta Kelahiran	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.27	PUPNS/PUASN	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.28	Pengambilan Sumpah atau Janji Aparatur Sipil Negara dan Jabatan	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.29	Permohonan Netralitas Aparatur Sipil Negara	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.30	Keterangan Mutasi Keluarga	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.31	Keterangan Meninggal Dunia	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.32	Keterangan Peningkatan Pendidikan	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.33	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.34	Keterangan Hasil Penelitian Khusus	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

			12.35	Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.36	Tugas atau Izin Belajar	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.37	Izin Bepergian ke Luar Negeri	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.38	Ijazah atau Sertifikat	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.39	Keputusan Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.40	Keputusan Penempatan atau Penarikan Pegawai	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.41	Pertimbangan Status Aparatur Sipil Negara	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.42	Keputusan Pengaktifan Kembali sebagai Aparatur Sipil Negara	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.43	Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala atau Wakil Kepala Daerah	5 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			12.44	Keputusan Pensiun	6 Tahun Setelah Berhenti/Pensiun	6 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

		<b>HR 13</b>	Berkas perseorangan Kepala, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Aparatur Sipil Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional	2 Tahun Setelah Berhenti	-	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>PR</b>	<b>PERENCANAAN</b>								
		<b>PR 01</b>	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi								
			01.01 Rencana Pembangunan Jangka Panjang	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			01.02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			01.03 Rencana Kerja Pemerintah	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
		<b>PR 02</b>	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku							
			02.01 Rencana Strategis	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			02.02 Rencana Kerja tahunan, terdiri dari:	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			-	Rencana Kerja Kementerian/							
			-	Rencana Kerja dan Anggaran							
		<b>PR 03</b>	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
		<b>PR 04</b>	Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan

		<b>PR 05</b>	Penetapan/Kontrak Kerja		1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			05.01	Penetapan/Kontrak Kerja Kepala Lembaga dan Eselon I	1 Tahun	4 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			05.02	Penetapan/Kontrak Kerja Aparatur Sipil Negara	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
		<b>PR 06</b>	Pengelolaan Program Kerja dan Anggaran									
			06.01	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan, Termasuk Revisinya	1 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berakhir	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			06.02	Peraturan Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran yang Dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berakhir	4 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
		<b>PR 07</b>	Laporan									
			07.01	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester	2 Tahun	-	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			07.02	Laporan Tahunan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Tahun	4 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			07.03	Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Tahun	2 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			07.04	Laporan Insidental	2 Tahun	4 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			-	Laporan Pidato Kenegaraan								

			-	Laporan Rencana Aksi Nasional								
	<b>KU</b>	<b>KEUANGAN</b>										
		<b>KU 01</b>	Pelaksanaan Anggaran									
			01.01	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1 Tahun Setelah Undang-Undang tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	7 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			01.02	Bantuan atau Hibah bantuan Luar								
			-	Bantuan/Pinjaman/Hibah Luar Negeri	1 Tahun Setelah Dilaksanakan	13 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			-	Bantuan/Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	1 Tahun Setelah Dilaksanakan	13 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
		<b>KU 02</b>	Belanja									
			02.01	Permintaan Pembayaran:	1 Tahun Setelah Undang-Undang tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			-	Uang Persediaan								
			-	Tambahan Persediaan								
			-	Ganti Uang Persediaan								
		<b>KU 03</b>	Pertanggungjawaban Langsung:		1 Tahun Setelah Undang-Undang tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	9 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			-	Surat Perintah Membayar								
			-	Surat Permintaan Pembayaran								
			-	Surat Perintah Pencairan Dana								
			-	Data dukung lainnya								
		<b>KU 04</b>	Pembukuan Anggaran		2 Tahun Setelah Undang-Undang tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	5 Tahun	Musnah	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan

		<b>KU 05</b>	Daftar Gaji, Kartu Gaji, dan Keterangan Penghasilan	1 Tahun Setelah Undang-Undang tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	3 Tahun	Musnah	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
		<b>KU 06</b>	Bukti Setor	1 Tahun Setelah Undang-Undang tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
		<b>KU 07</b>	Laporan Kas Bendahara	2 Tahun Setelah Undang-Undang tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	7 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			- Berita Acara Pemeriksaan								
			- Kas/Register Penutupan Kas								
			- Kuitansi Pembayaran dan Berita Acara Transfer								
			- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara								
			- Laporan Pendapatan								
			- Laporan Keadaan Kredit Anggaran Bulanan/Triwulanan/Semesteran								
		<b>KU 08</b>	Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal	1 Tahun Setelah Undang-Undang tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Koordinator	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Keuangan

		<b>KU 09</b>	Laporan Keuangan tahunan ( <i>Unaudited, Audited</i> , Semester 1, Triwulan 3)	2 Tahun Setelah Undang-Undang tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	5 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan	
			-	Laporan Realisasi Anggaran								
			-	Neraca								
			-	Laporan Arus Kas								
			-	Laporan Barang Milik Negara								
			-	Laporan Realisasi Pendapatan Negara								
			-	Catatan atas Laporan Keuangan								
		<b>KU 10</b>	PENATAUSAHAAN KEUANGAN									
			10.01	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Tahun Setelah Undang-Undang tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	5 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			10.02	Laporan Hasil Review Inspektorat	2 Tahun Setelah Undang-Undang tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	5 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			10.03	Laporan Aparat Pemeriksaan Fungsional:	2 Tahun Setelah Undang-Undang tentang Pertanggung jawaban APBN Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	5 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
			-	Laporan Hasil Pemeriksaan								
			-	Memo Hasil Pemeriksaan								
			-	Tindak Lanjut/Tanggapan								

			10.04	Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara:	5 Tahun Setelah Mendapat Keputusan Hukum yang Tetap, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan
				-	Tuntutan Pembendaharaan							
				-	Tuntutan Ganti Rugi							
				<b>PB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA</b>								
				<b>PB 01</b> Perencanaan Barang Milik Negara								
			01.01	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja	4 Tahun Setelah Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Disetujui Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
				-	Surat Pengantar Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara □							
				-	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Barang atas Kebenaran Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara □							
				-	Laporan hasil review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah □							
			01.02	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tingkat Eselon II	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
				<b>PB 02</b> Penggunaan Barang Milik Negara								
			02.01	Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dengan Nilai Perolehan di atas Rp100.000.000	1 Tahun Setelah Barang Tidak Dikuasai	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
				-	Surat Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara □							

				- Hasil Penetapan Status Penggunaan Berupa Keputusan Menteri Keuangan□								
			02.02	Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Dengan Nilai Perolehan sampai dengan Rp100.000.000	1 Tahun Setelah Barang Tidak dikuasai	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
				- Permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara□								
				- Hasil Penetapan Status Penggunaan berupa Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah□								
		<b>PB 03</b>		Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Sewa	1 Tahun Setelah Barang Tidak dikuasai	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
				- Surat Usulan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk Menyewakan Barang Milik Negara								
				- Surat Persetujuan atas Permohonan Sewa dari Pengelola Barang								
				- Keputusan Kepala Terkait Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara								
				- Perjanjian Sewa dengan Pihak Penyewa								
		<b>PB 04</b>		Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik								
			04.01	Asuransi Barang Milik Negara Berupa Gedung dan Bangunan	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
				- Rencana pengasuransian Barang Milik Negara□								
				- Polis asuransi□								
				- Laporan Pengasuransian Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang□								

			04.01	Pengamanan Barang Milik Negara	1 Tahun Setelah Barang Tidak Dikuasai	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
				- Dokumen-dokumen Kepemilikan Aset								
				- Berita Acara Serah Terima Penerimaan dan Penyerahan Aset								
			04.01	Pemeliharaan Barang Milik Negara	1 Tahun Setelah Barang Tidak Dikuasai	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
				- Surat Perintah Kerja								
			<b>PB 05</b>	<b>Pemindahtanganan Barang Milik Negara</b>								
			05.01	Penjualan melalui Lelang	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
				- Permohonan Penjualan Barang Milik Negara dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang beserta Lampirannya								
				- Persetujuan penjualan Barang Milik Negara oleh Pengelola Barang								
				- Risalah Lelang								
			05.02	Penjualan Tanpa Melalui Lelang	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
				- Surat Permohonan dari Pegawai Aparatur Sipil Negara ke Pengguna Barang beserta lampirannya								
				- Berita Acara Penelitian Permohonan								
				- Permohonan Penilaian Nilai Wajar Kendaraan dari Pengguna Barang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang								

				- Permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang yang Diajukan Secara Tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang beserta Lampirannya								
				- Surat Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang								
				- Perjanjian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas antara Pengguna Barang dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara								
				- Berita Acara Serah Terima Kendaraan Perseorangan Dinas								
		<b>PB 06</b>	Pemusnahan Barang Milik Negara		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
				- Laporan Hasil Penelitian Barang yang akan Dimusnahkan								
				- Surat Permohonan Pemusnahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang beserta Lampirannya								
				- Surat persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara								
				- Berita Acara Pemusnahan								
		<b>PB 07</b>	Penghapusan Barang Milik Negara		1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
				- Berita Acara Penelitian Penghapusan								
				- Surat Permohonan Persetujuan Penghapusan ke Pengguna Barang maupun Pengelola Barang beserta Lampirannya								
				- Surat Persetujuan Penghapusan								

		<b>PB 08</b>	Penatausahaan Barang Milik Negara								
			08.01 Pembukuan	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
			- Checklist Barang Milik Negara, Aset Tak Berwujud, dan Persediaan <input type="checkbox"/>								
			- Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara <input type="checkbox"/>								
			- Dokumen Kepemilikan atau Perolehan <input type="checkbox"/>								
			- Daftar Barang pada Pengguna Barang <input type="checkbox"/>								
			- Buku Barang pada Kuasa Pengguna Barang <input type="checkbox"/>								
			- Surat Keterangan Perubahan Kondisi Aset <input type="checkbox"/>								
			08.02 Inventarisasi	1 Tahun Setelah Data Dimutakhirkan	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
			- Berita Acara Opname Fisik <input type="checkbox"/>								
			- Daftar Barang Ruangan <input type="checkbox"/>								
			- Daftar Barang Lainnya <input type="checkbox"/>								
			- Kartu Identitas Barang <input type="checkbox"/>								
			08.03 Barang Pengguna	1 Tahun	5 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
			- Barang Pengguna Semester I <input type="checkbox"/>								
			- Barang Pengguna Semester II <input type="checkbox"/>								
			- Barang Pengguna <i>Unaudited</i> <input type="checkbox"/>								
			- Barang Pengguna <i>Audited</i> <input type="checkbox"/>								
		<b>PB 09</b>	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara	1 Tahun	5 Tahun	Permanen	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN

LP	LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK									
	LP 01	Sertifikat Standardisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
	LP 02	Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
		02.01 Verifikasi Penyedia	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
		02.02 Permohonan <i>Admin Agency</i>	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
		02.03 Pelayanan <i>Helpdesk</i> Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Sistem Informasi
	BJ	PENGADAAN BARANG/JASA								
	BJ 01	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
	BJ 02	Pengadaan								
		02.01 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
		- Kerangka Acuan Kerja □								
		- Harga Perkiraan Sendiri □								
		- Rancangan Kontrak □								
		02.02 Persiapan Pemilihan Penyedia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
		- Kaji Ulang Dokumen Persiapan Pengadaan								

			02.02	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
				- Pemilihan Penyedia Melalui Metode <i>e-Purchasing</i> □								
				- Pemilihan Penyedia Melalui Metode Pengadaan Langsung □								
				- Pemilihan Penyedia Melalui Metode Penunjukan Langsung □								
				- Pemilihan Penyedia Melalui Metode Tender Cepat □								
				- Pemilihan Penyedia Melalui Metode Tender □								
		<b>BJ 03</b>		Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
				- Penunjukan Penyedia Barang/Jasa								
				- Kontrak								
				- Surat Perintah Mulai Kerja								
				- Laporan Pelaksanaan								
				- Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan								
		<b>BJ 04</b>		Swakelola								
			04.01	Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
			04.02	Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN
			04.03	Pengawasan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LKPP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN

RT	RUMAH TANGGA									
	RT 01	Penggunaan/Langgan Daya dan Jasa Telepon, Internet, Listrik, Air dan Gedung	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Rumah Tangga dan Protokol
	RT 02	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, dan Komputer	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Rumah Tangga dan Protokol
	RT 03	Pemeliharaan Gedung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Rumah Tangga dan Protokol
	RT 04	Penggunaan Fasilitas Kantor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Rumah Tangga dan Protokol
	RT 05	Pengelolaan Prasarana Kantor	2 Tahun	2 Tahun	Musnah, Kecuali Surat-surat Pendirian Gedung Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Rumah Tangga dan Protokol
		-								
		-								
	RT 06	Ketertiban dan Keamanan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Rumah Tangga dan Protokol
	RT 07	Pengelolaan Perparkiran	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Rumah Tangga dan Protokol
HM	HUBUNGAN MASYARAKAT									
	HM 01	Pameran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	HM 02	Press Release	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	HM 03	Publikasi lainnya	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

		<b>HM 04</b>	Analisis Berita		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		<b>HM 05</b>	Hubungan Antar									
			05.01	Kementerian	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
			05.02	Lembaga	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
			05.03	Organisasi Pengadaan Nasional dan Internasional	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
			05.04	Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
			05.05	Organisasi Kemasyarakatan	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
			05.06	Perguruan Tinggi/Sekolah	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
			05.07	Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		<b>HM 06</b>	Dokumentasi dan Penerbitan		1 Tahun	3 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		<b>HM 07</b>	Penghargaan		1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

		<b>HM 08</b>	Kenang-kenangan		1 Tahun	2 Tahun	Permanen Apabila Pemberian/Ta nda Kenang- kenangan kepada Masyarakat yang Memiliki Prestasi Besar	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		<b>HM 09</b>	Penyediaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		2 Tahun	4 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		<b>HK</b>	<b>HUKUM</b>									
		<b>HK 01</b>	Program Legalisasi									
			01.01	Bahan/Materi Program Legalisasi Nasional	1 Tahun	2 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			01.02	Program Legalisasi Pengadaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HK 02</b>	Rancangan Peraturan Perundang-undangan									
			02.01	Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir, dan Telaahan Hukum sampai dengan Diundangkan	1 Tahun Setelah Diundangkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			02.02	Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir, dan Telaahan Hukum sampai dengan Diundangkan	1 Tahun Setelah Diundangkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

			02.03	Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir, dan Telaahan Hukum sampai dengan Diundangkan	1 Tahun Setelah Diundangkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HK 03</b>		Rancangan Peraturan Kepala/Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, dan Telaahan hukum sampai diundangkan	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HK 04</b>		Rancangan Keputusan /Ketetapan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, dan Telaahan hukum sampai dengan ditetapkan	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HK 05</b>		Instruksi/Surat Edaran								
			05.01	Instruksi/Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan Telaahan hukum	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			05.02	Instruksi/Surat Edaran Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan Telaahan hukum	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	2 Tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HK 06</b>		Standar/Pedoman /Prosedur Kerja/Petunjuk/Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang Bersifat Nasional/Regional /Instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HK 07</b>		Nota Kesepahaman ( <i>Memorandum of</i>								
			07.01	Dalam Negeri	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			07.02	Luar Negeri	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

		<b>HK 08</b>	Dokumentasi Hukum	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	-	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	-	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HK 09</b>	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum								
			09.01 Sosialisasi/Penyuluhan/ Pembinaan Hukum	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			09.02 Hasil Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HK 10</b>	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>HK 11</b>	Kasus/Sengketa Hukum								
			11.01 Pidana	1 Tahun Setelah Memperoleh Keputusan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	2 Tahun	Musnah	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			11.02 Perdata	1 Tahun Setelah Memperoleh Keputusan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	2 Tahun	Musnah	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			11.03 Tata Usaha Negara	1 Tahun Setelah Memperoleh Keputusan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	2 Tahun	Musnah	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>OT</b>	<b>ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b>								
		<b>OT 01</b>	Kelembagaan	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

		<b>OT 02</b>	Analisis Jabatan/Uraian Jabatan	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>OT 03</b>	Analisis Beban Kerja	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	5 Tahun	Musnah					
		<b>OT 04</b>	Standar Kompetensi Jabatan	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>OT 05</b>	Evaluasi Jabatan	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>OT 06</b>	Standar Operasional Prosedur	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>OT 07</b>	Peta Proses Bisnis	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>OT 08</b>	Standar Pelayanan	1 Tahun Setelah Tidak Berlaku	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		<b>OT 09</b>	Reformasi Birokrasi								
			09.01 Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Tahun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			09.02 Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Tahun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			09.03 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Tahun	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

PW	PENGAWASAN										
	<b>PW 01</b>	Rencana Pengawasan									
		01.01	Rencana Pengawasan Jangka Menengah 5 tahunan	1 Tahun Setelah Masa Berlaku Selesai	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
		01.02	Program Kerja Pengawasan tahunan	1 Tahun Setelah Masa Berlaku Selesai	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
		01.03	Manajemen Risiko	1 Tahun Setelah Masa Berlaku Selesai	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
	<b>PW 02</b>	Pelaksanaan Kegiatan Audit									
		02.01	<b>Audit dengan Tindak Lanjut</b> Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Audit Operasional, Laporan Auditor Independen, Laporan Akuntan, Laporan Penyelesaian Kerugian Negara, dan Laporan Hasil Audit Investigasi yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) ataupun Pelanggaran Kode Etik serta Memerlukan Tindak Lanjut	2 Tahun Setelah Undang-Undang tentang APBN Disahkan dan/atau Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan Telah Selesai	3 Tahun	Dinilai Kembali	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
			- Surat Tugas								
			- Data Dukung								
			- Kertas Kerja								
			- Notula								
			- Berita Acara								
			- Notisi								
			- Laporan								
			- Tindak Lanjut								
		02.02	<b>Audit Tanpa Tindak Lanjut</b> 'Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Audit Operasional, Laporan Hasil Audit Investigasi, Laporan Akuntan, Laporan Auditor Independen, dan Laporan Akuntan yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Inspektorat
			- Surat Tugas								

				-	Data Dukung							
				-	Kertas Kerja							
				-	Notula							
				-	Berita Acara							
				-	Notisi							
				-	Laporan							
				-	Tindak Lanjut							
		<b>PW 03</b>	Pelaksanaan Kegiatan Reviu									
			03.01	Reviu yang Memerlukan Tindak Lanjut□	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Reviu Telah Selesai	3 Tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
				-	Administrasi							
				-	Data Dukung							
				-	Kertas Kerja							
				-	Notula							
				-	Berita Acara							
				-	Laporan							
				-	Tindak Lanjut							
			03.02	Reviu yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut□	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
				-	Administrasi							
				-	Data Dukung							
				-	Kertas Kerja							
				-	Notula							
				-	Berita Acara							
				-	Laporan							
				-	Tindak Lanjut							

		<b>PW 04</b>	Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi									
			04.01	Evaluasi yang Memerlukan Tindak Lanjut□	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Reviu Telah Selesai	3 Tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
				- Administrasi								
				- Data Dukung								
				- Kertas Kerja								
				- Notula								
				- Berita Acara								
				- Laporan								
				- Tindak Lanjut								
			04.02	Evaluasi yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut□	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
				- Administrasi								
				- Data Dukung								
				- Kertas Kerja								
				- Notula								
				- Berita Acara								
				- Laporan								
				- Tindak Lanjut								
		<b>PW 05</b>	Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan									
			05.01	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal□	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
			05.02	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal□	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
			05.03	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program□	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat

			-	Administrasi								
			-	Data Dukung								
			-	Kertas Kerja								
			-	Notula								
			-	Berita Acara								
			-	Laporan								
			-	Tindak Lanjut								
			05.04	Pemantauan Kegiatan Rapat di luar Kantor□	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
		<b>PW 06</b>	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya									
			06.01	Sosialisasi Pengawasan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
			06.02	Asistansi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
			06.03	Pembimbingan dan Konsultasi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
			06.04	Pendampingan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
			06.05	Program Penilaian Mandiri	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
		<b>PW 07</b>	Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Whistleblowing System Internal, Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, dan Gratifikasi									

		07.01	Data dan Informasi Whistleblowing System Internal, Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, dan Gratifikasi yang Memerlukan Tindak Lanjut	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
		07.02	Laporan Hasil Penanganan Whistleblowing System Internal, Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, dan Gratifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
		<b>PW 07</b>	<b>Pengendalian Pengawasan</b>								
		07.01	Reviu Internal atas Jaminan Kualitas Pengawasan Intern	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
		07.02	Reviu Eksternal atas Evaluasi Keseluruhan Pengawasan Intern	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon IV	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Unit Teknis di LKPP	Inspektorat
	<b>TU</b>	<b>TATA USAHA</b>									
		<b>TU 01</b>	Administrasi Persuratan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha
			- Rekapitulasi Agenda Surat Masuk								
			- Rekapitulasi Agenda Surat Keluar								
		<b>TU 02</b>	<b>Dokumen Pemeliharaan Arsip:</b>								
		02.01	Pemeliharaan Arsip dan Ruang Penyimpanan (Seperti Kegiatan Fumigasi)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha
		02.02	Daftar Pencarian Arsip Daftar Arsip Aktif	1 Tahun Setelah Tidak dipergunakan	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha
		02.03	Daftar Arsip Informasi Publik	1 Tahun Setelah Tidak dipergunakan	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha

			02.04	Daftar Arsip Vital/Aset	1 Tahun Setelah Tidak dipergunakan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha
		<b>TU 03</b>		Persetujuan Jadwal Retensi Arsip	1 Tahun Setelah Ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha
		<b>TU 04</b>		Persetujuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1 Tahun Setelah Ditetapkan	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha
		<b>TU 05</b>		Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha
		<b>TU 06</b>		Penyusutan Arsip								
			06.01	Pemindahan Arsip Inaktif	1 Tahun Setelah Berlaku	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha
				- Berita Acara Pemindahan Arsip								
				- Daftar Arsip yang dipindahkan								
			06.02	Pemusnahan Arsip yang Tidak Bernilai Guna	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha
				- Keputusan Tim Panitia Pemusnahan								
				- Surat Permohonan Persetujuan Pemusnahan								
				- Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip								
				- Notula Rapat Panitia Penilai								
				- Daftar Arsip Usul Musnah								
				- Surat Persetujuan dari Pimpinan Pencipta Arsip								
				- Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia								
				- Berita Acara Pemusnahan Arsip								
				- Keputusan Pemusnahan Arsip								
			06.03	Penyerahan Arsip Statis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha



		<b>PO 03</b>	Agenda Pimpinan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Rumah Tangga dan Protokol
		<b>PO 04</b>	Perjalanan Dinas Pimpinan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Rumah Tangga dan Protokol
		<b>PT</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>								
		<b>PT 01</b>	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka								
			01.01 Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
			01.02 Administrasi Pengolahan Deposit Bahan Pustaka	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
		<b>PT 02</b>	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka								
			02.01 Buku Induk Koleksi	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	2 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
			02.02 Daftar Buku Terseleksi	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
			02.03 Daftar Buku dalam Pesanan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
			02.04 Daftar Buku dalam Permintaan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga

			02.05	Daftar Penerimaan Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah, Deposit, dan Hibah	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
			02.06	Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Surplus	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
			02.07	Lembar Kerja Pengolahan Bahan Pustaka	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
			02.08	Jaringan Kartu Utama	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
			02.09	Daftar Tambahan Buku ( <i>Assesion List</i> )	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
			02.10	Daftar/Jaringan Kendali (Subjek dan Pengarang)	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
		<b>PT 03</b>	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi									
			03.01	Data dan Statistik Anggota, Pengunjung, dan Peminjaman Bahan Pustaka	2 Tahun	2 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
			03.02	Pertanyaan Rujukan dan Jawaban	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
		<b>PT 04</b>	Preservasi Bahan Pustaka									

		04.01	Survei Kondisi Bahan Pustaka	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
		04.02	Reprografi Bahan Pustaka	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
	<b>SI</b>	<b>SISTEM INFORMASI</b>									
	<b>SI 01</b>	Pengembangan Sistem Informasi									
		01.01	Perencanaan Sistem Informasi	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
		01.02	Kajian Analisis	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
		01.03	Rancangan Desain	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
		01.04	Konstruksi Sistem	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
		01.05	Pengujian Sistem	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
		01.06	Implementasi Sistem	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
		01.07	Panduan Penggunaan	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi

		<b>SI 02</b>	Pengelolaan Sistem Informasi									
			02.01	Permintaan Perubahan Sistem Informasi	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
			02.03	Pemeliharaan Sistem Informasi	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
			02.03	Layanan Dukungan Pengguna	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
		<b>SI 03</b>	Data dan Informasi									
			03.01	Pengelolaan Data dan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
			03.02	Penyajian Data dan Informasi	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
			03.03	Statistik Data dan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
		<b>SI 04</b>	Pengembangan dan Pengamanan Jaringan									
			04.01	Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
			04.02	Pengelolaan Jaringan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
		<b>SI 05</b>	Hosting		1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi
		<b>SI 06</b>	Layanan Back-up Data Digital		1 Tahun	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Data dan Informasi

II	SUBSTANTIF											
PU	PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN											
PU 01	Agenda Setting dalam rangka Perencanaan											
		01.01	Pemilihan Penyedia	5 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	
		01.02	Swakelola	5 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	
		01.03	Produk Dalam Negeri	5 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	
		01.04	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	
		01.05	Isu Strategik terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lainnya	5 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	
PU 02	Formulasi Kebijakan dalam rangka											
		02.01	Peraturan Presiden	5 Tahun	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	

			02.02	Peraturan Lembaga	5 Tahun	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
			02.03	Keputusan Deputi	5 Tahun	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
			02.04	Surat Edaran	5 Tahun	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		<b>PU 03</b>	Implementasi Kebijakan dalam rangka									
			03.01	Penafsiran Peraturan Perundang-undangan	5 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
			03.02	Diseminasi Peraturan	5 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		<b>PU 04</b>	Pemantauan Evaluasi Kebijakan dalam rangka									
			04.01	Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

			04.02	Peraturan dan Kebijakan Turunan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
			04.03	Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		<b>PU 05</b>	Pendampingan Peraturan Perundang-									
			05.01	Kebijakan Pengadaan Barang Jasa di Badan Layanan Umum	5 Tahun	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
			05.02	Kebijakan Pengadaan Barang Jasa di Kementerian Lembaga Daerah	5 Tahun	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
			05.03	Kebijakan Pengadaan Barang Jasa di Perguruan Tinggi Negeri	5 Tahun	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		<b>KK</b>	<b>PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>									
		<b>KK 01</b>	Perumusan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa									
			01.01	Peraturan/Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa	2 Tahun Setelah Penetapan	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				- Inventarisasi Permasalahan atau Isu								
				- Pembahasan Permasalahan atau Isu								
				- Penyusunan Laporan								
				- Berkas Finalisasi								

				-	<i>Policy Brief</i>								
				-	<i>Policy Paper</i>								
				-	Telaahan Staf								
			01.02		Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Desa	2 Tahun Setelah Penetapan	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				-	Berkas Inventarisasi Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Pembahasan Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Penyusunan Laporan								
				-	Berkas Finalisasi								
				-	<i>Policy Brief</i>								
				-	<i>Policy Paper</i>								
				-	Berkas Telaahan Staf								
			01.03		Model Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa	2 Tahun Setelah Penetapan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				-	Berkas Inventarisasi Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Pembahasan Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Penyusunan Laporan								
				-	Berkas Finalisasi								
		<b>KK 02</b>	Perumusan Kebijakan Pengadaan pada Kerja										
			02.01		Peraturan/Pedoman Pengadaan pada Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha	2 Tahun Setelah Penetapan	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				-	Berkas Inventarisasi Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Pembahasan Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Penyusunan Laporan								
				-	Berkas Finalisasi								
				-	<i>Policy Brief</i>								
				-	<i>Policy Paper</i>								
				-	Berkas Telaahan Staf								

			02.02	Kajian Pengadaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha	2 Tahun Setelah Penetapan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				- Berkas Inventarisasi Permasalahan atau Isu								
				- Berkas Pembahasan Permasalahan atau Isu								
				- Berkas Penyusunan Laporan								
				- Berkas Finalisasi								
				- <i>Policy Brief</i>								
				- <i>Policy Paper</i>								
				- Berkas Telaahan Staf								
			02.03	Pengadaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha	2 Tahun Setelah Penetapan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				- Berkas Inventarisasi Permasalahan atau Isu								
				- Berkas Pembahasan Permasalahan atau Isu								
				- Berkas Penyusunan Laporan								
				- Berkas Finalisasi								
		<b>KK 03</b>		Perumusan Kebijakan pada Badan Layanan								
			03.01	Penyusunan Peraturan/Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah	2 Tahun Setelah Penetapan	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				- Berkas Inventarisasi Permasalahan atau Isu								
				- Berkas Pembahasan Permasalahan atau Isu								
				- Berkas Penyusunan Laporan								
				- Berkas Finalisasi								
				- <i>Policy Brief</i>								
				- <i>Policy Paper</i>								
				- Berkas Telaahan Staf								
			03.02	Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah	2 Tahun Setelah Penetapan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus

				-	Berkas Inventarisasi Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Pembahasan Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Penyusunan Laporan								
				-	Berkas Finalisasi								
				-	<i>Policy Brief</i>								
				-	<i>Policy Paper</i>								
				-	Berkas Telaahan Staf								
			03.03		Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah	2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berjalan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				-	Berkas Inventarisasi Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Pembahasan Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Penyusunan Laporan								
				-	Berkas Finalisasi								
		<b>KK 04</b>	Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus										
			04.01		Penyusunan Peraturan/Pedoman Pengadaan Khusus	2 Tahun Setelah Penetapan	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				-	Berkas Inventarisasi Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Pembahasan Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Penyusunan Laporan								
				-	Berkas Finalisasi								
				-	<i>Policy Brief</i>								
				-	<i>Policy Paper</i>								
				-	Berkas Telaahan Staf								
			04.02		Penyusunan Kajian Pengadaan Khusus	2 Tahun Setelah Penetapan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				-	Berkas Inventarisasi Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Pembahasan Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Penyusunan Laporan								
				-	Berkas Finalisasi								
				-	<i>Policy Brief</i>								

				-	<i>Policy Paper</i>								
				-	Berkas Telaahan Staf								
			04.03		Pengadaan Khusus	2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berakhir	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				-	Berkas Inventarisasi Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Pembahasan Permasalahan atau Isu								
				-	Berkas Penyusunan Laporan								
				-	Berkas Finalisasi								
		<b>KK 05</b>			Pemberian Pendapat dalam Penyusunan								
			05.01		Pendampingan Penyusunan Pengadaan Barang/Jasa di Desa	2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berjalan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				-	Berkas Penelahaan Permohonan Pendampingan								
				-	Berkas pelaksanaan pendampingan								
				-	Berkas penyusunan laporan pendampingan								
			05.02		Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa	2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berjalan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				-	Berkas Penelahaan Permohonan Pendampingan								
				-	Berkas Pelaksanaan Pendampingan								
				-	Berkas Penyusunan Laporan Pendampingan								
			05.03		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa	2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berjalan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				-	Monitoring Pengadaan Barang/Jasa di Desa								
				-	Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa								
		<b>KK 06</b>			Pemberian Pendapat Terkait Pengadaan Kerja								

			06.01	Pemberian Pendapat Terkait Pengadaan pada Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha	2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berjalan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				- Berkas Penelahaan Permohonan Pendampingan								
				- Berkas Pelaksanaan Pendampingan								
				- Berkas Penyusunan Laporan Pendampingan								
			06.02	Peningkatan Kapasitas Eksternal Terkait Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha	2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berjalan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
			06.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan pada Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha	2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berjalan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				- Monitoring Pengadaan Barang/Jasa di Desa								
				- Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa								

		<b>KK 07</b>	Pemberian Pendapat dalam Penyusunan									
			07.01	Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman /Dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum, dan Badan Hukum Publik	2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berjalan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				- Berkas Penelahaan Permohonan Pendampingan								
				- Berkas Pelaksanaan Pendampingan								
				- Berkas Penyusunan Laporan Pendampingan								
			07.02	Konsultasi Penyusunan Peraturan/Pedoman/ Dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum, dan Badan Hukum Publik	2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berjalan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				- Berkas Penelahaan Permohonan Pendampingan								
				- Berkas Pelaksanaan Pendampingan								
				- Berkas Penyusunan Laporan Pendampingan								
			07.03	Pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum, dan Badan Hukum Publik	2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berjalan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				- Monitoring Pengadaan Barang/Jasa di Badan Usaha, Badan Layanan Umum, dan Badan Hukum Publik								
				- Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa di Badan Usaha, Badan Layanan Umum, dan Badan Hukum Publik								
		<b>KK 08</b>	Diseminasi/Bimbingan Teknis									
			08.01	Diseminasi/Bimbingan Teknis/Sosialisasi Peraturan/ Pedoman/ Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa di Desa	2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berjalan	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Publik (Masyarakat Umum)	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				- Berkas Pelaksanaan Diseminasi								
				- Berkas Evaluasi Diseminasi								

				-	Berkas Penyusunan Laporan Diseminasi								
			08.02		Diseminasi/Bimbingan Teknis/Sosialisasi Peraturan/ Pedoman/ Dokumen Pengadaan pada Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha	2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berjalan	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Publik (Masyarakat Umum)	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				-	Berkas Pelaksanaan Diseminasi								
				-	Berkas Evaluasi Diseminasi								
				-	Berkas Penyusunan Laporan Diseminasi								
			08.03		Diseminasi/Bimbingan Teknis Peraturan/Pedoman/ Dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum, dan Badan Hukum Publik	2 Tahun Setelah Tahun Anggaran Berjalan	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Publik (Masyarakat Umum)	Publik/ Masyarakat Umum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				-	Berkas Pelaksanaan Diseminasi								
				-	Berkas Evaluasi Diseminasi								
				-	Berkas Penyusunan Laporan Diseminasi								
		<b>KK 09</b>	Survei										
			09.01		Pelaksanaan Survei	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Berakhir	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja unit organisasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
				-	Berkas Penyusunan Kuesioner								
				-	Lembar Kuisisioner								
				-	Berkas Pengumpulan dan Pengolahan Data								
				-	Laporan Survei								
		<b>IU</b>	<b>PENGEMBANGAN IKLIM USAHA</b>										
		<b>IU 01</b>	Rumusan Strategi dan Kebijakan Iklim Usaha										
			01.01		Kajian Iklim Usaha	3 Tahun Setelah Diterbitkan	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			01.02		Roadmap/Business Process Iklim Usaha	3 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

			01.03	<i>Policy Brief Iklim Usaha</i>	5 Tahun Setelah Diterbitkan	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			01.04	Telaahan Staf Iklim Usaha	5 Tahun Setelah Diterbitkan	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
			01.05	Memo Kebijakan	5 Tahun Setelah Diterbitkan	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
			01.06	<i>Policy Paper Iklim Usaha</i>	5 Tahun Setelah Diterbitkan	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			01.07	Peraturan Perundang-undangan	3 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		<b>IU 02</b>		Rumusan Pedoman Iklim Usaha								
			02.01	Standar Pelayanan	3 Tahun Setelah Tidak Berlaku	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			02.02	<i>Standart Operasional Prosedur</i>	3 Tahun Setelah Tidak Berlaku	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

			02.03	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria/Pedoman/Petunjuk Teknis/ <i>User Guide</i>	5 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		<b>IU 03</b>	Sosialisasi/Bimbingan Teknis/ Seminar/									
			03.01	Sosialisasi/Seminar	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			03.02	Kuliah Umum	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			03.03	Bimbingan Teknis/ <i>Capacity Building/ Workshop</i>	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			03.04	Diseminasi/ <i>Focus Group Discussion</i> /Uji Publik	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik (Masyarakat Umum)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		<b>IU 04</b>	Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi									
			04.01	Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi bagi Pelaku Usaha	1 Tahun Setelah Diperbaharui	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			04.02	Database pelaku usaha	1 Tahun Setelah Diperbaharui	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		<b>IU 05</b>	Monitoring dan Evaluasi									

			05.01	Kuesioner Survei	3 Tahun Setelah Diterbitkan	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			05.02	Laporan Hasil Pengolahan Survei	3 Tahun Setelah Diterbitkan	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			<b>KI PENGEMBANGAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DI</b>									
			<b>KI 01</b>	Strategi dan Kebijakan Pengadaan								
			01.01	Inventarisasi masalah/Identifikasi Isu dan Kajian (Policy Brief, Policy Paper, Telaahan, dan lain-lain)	5 Tahun Setelah Ditetapkan	5 Tahun	Permanen	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang serius, mengganggu kepentingan nasional, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
				-	Berkas Bilateral							
				-	Berkas Multilateral							
				-	Berkas Kerja Sama Internasional Lainnya							
			01.02	Penyusunan strategi/kebijakan	5 Tahun Setelah Ditetapkan	5 Tahun	Permanen	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang serius, mengganggu kepentingan nasional, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
				-	Berkas Bilateral							
				-	Berkas Multilateral							

			-	Berkas Kerja Sama Internasional Lainnya								
		<b>KI 02</b>	Perundingan Perdagangan Internasional untuk									
		02.01		Identifikasi Isu Kerjasama Perdagangan Internasional Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5 Tahun Setelah Ditetapkan	5 Tahun	Permanen	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang serius, mengganggu kepentingan nasional, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			-	Berkas Bilateral								
			-	Berkas Multilateral								
			-	Berkas Kerja Sama Internasional Lainnya								
		02.02		Strategi/Posisi Runding Kerjasama Perdagangan Internasional Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5 Tahun Setelah Ditetapkan	5 Tahun	Permanen	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang serius, mengganggu kepentingan nasional, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			-	Berkas Bilateral								
			-	Berkas Multilateral								
			-	Berkas Kerja Sama Internasional Lainnya								

			02.03	Laporan Perundingan Kerjasama Perdagangan Internasional Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5 Tahun Setelah Ditetapkan	5 Tahun	Permanen	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang serius, mengganggu kepentingan nasional, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
				- Berkas Bilateral								
				- Berkas Multilateral								
				- Berkas Kerja Sama Internasional Lainnya								
		<b>KI 03</b>		Keikutsertaan dalam Forum Internasional	2 Tahun	2 Tahun	Permanen	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang serius, mengganggu kepentingan nasional, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		<b>KI 04</b>		Sosialisasi/Bimbingan								
			04.01	Bimbingan Teknis/ <i>Capacity Building/Workshop</i>	3 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik  /Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			04.02	Sosialisasi/Seminar	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik  /Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

			04.03	Diseminasi/ <i>Focus Group Discussion</i> /Uji Publik	3 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		<b>KI 05</b>	Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri									
			05.01	Kajian	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			05.02	Seminar/ <i>Workshop</i>	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			05.03	Konsultasi	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		<b>PP</b>	<b>PERENCANAAN PENGADAAN BARANG JASA</b>									
		<b>PP 01</b>	Perencanaan Pengadaan									
			01.01	Berkas/Dokumen Penyusunan Pedoman Rencana Umum Pengadaan <input type="checkbox"/>	1 Tahun Setelah Pedoman Rencana Umum Pengadaan Tidak Berlaku/Sampai Diperbarui	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
				- Berkas Inventarisasi Masalah/Kajian								
				- Berkas Testing Aplikasi								
				- Berkas Intergrasi								
				- Berkas Finalisasi								
				- Berkas Laporan								
			01.02	Berkas/Dokumen Pengembangan Aplikasi Rencana Umum Pengadaan	1 Tahun Setelah Aplikasi Tidak Digunakan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
				- Berkas Inventarisasi Masalah/Kajian								

				-	Berkas Testing Aplikasi								
				-	Berkas Intergrasi								
				-	Berkas Finalisasi								
				-	Berkas Laporan								
			01.03		Berkas/Dokumen Sosialisasi	3 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
				-	Berkas Sosialisasi Pedoman Rencana Umum Pengadaan								
				-	Berkas Sosialisasi Aplikasi								

<b>ME MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN</b>												
		<b>ME 01</b>	Pengembangan Sistem/Aplikasi Monitoring									
		01.01	Berkas/Dokumen Pengembangan Aplikasi Monitoring Pengadaan Barang/Jasa		1 Tahun Setelah Aplikasi Tidak Digunakan	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi
			1)	Berkas Inventarisasi Masalah/Kajian								
			2)	Berkas Testing Aplikasi								
			3)	Berkas Intergrasi								
			4)	Berkas Finalisasi								
			5)	Berkas Laporan								
		<b>ME 02</b>	Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa									
		02.01	Berkas/Dokumen Penyusunan Alat Pengukuran Kinerja Pengadaan		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
		02.02	Berkas/Dokumen Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
		02.03	Berkas/Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
		<b>ME 03</b>	Administrasi Penayangan Daftar Hitam									
		03.01	Berkas/Dokumen Laporan Monitoring Penayangan Daftar Hitam		2 Tahun	5 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
		03.02	Berkas/Dokumen Laporan Monitoring Penurunan Daftar Hitam		2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan

		<b>ME 04</b>	Sosialisasi Sistem Monitoring dan Evaluasi	3 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan	
		<b>ME 05</b>	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi	5 Tahun Setelah tahun Anggaran berakhir	5 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan	
		<b>KN</b>	<b>PENGELOLAAN KATALOG NASIONAL</b>									
		<b>KN 01</b>	Telaahan Produk Untuk Proses Pencantuman									
			01.01	Hasil Telaahan Produk	5 Tahun	3 Tahun	Musnah, Kecuali Laporan Telaahan Hasil Riset Pasar/Industri Barang Jasa Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
			01.02	Pembuatan Keputusan Deputi tentang Verifikator Katalog Elektronik Nasional	5 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
				- Keputusan Deputi tentang Verifikator Katalog Elektronik Nasional								
				- Tambahan Dokumen Berupa Surat Usulan Nama Verifikator dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah								
			01.03	Pelaksanaan Kontrak	3 Tahun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
				- Berkas Rapat								
				- Dokumen Kontrak Katalog								
				- Keputusan Penetapan								
				- Nota Dinas								
				- Bukti Pengambilan Kontrak Katalog dan Keputusan Penetapan								
				- Adendum Kontrak Katalog								
		<b>KN 02</b>	Pengumuman Pendaftaran Penyedia									

			02.01	Pembuatan Kebijakan Sistem Katalog Elektronik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
				- Berkas Rapat								
				- Pedoman Kebijakan Sistem Katalog Elektronik								
				- Nota Dinas Penyampaian								
				- Laporan								
				- Notula								
				- Draf Peraturan Terkait Katalog Elektronik								
				- Keputusan Penyelenggaraan Katalog Elektronik								
			02.02	Pembuatan Pedoman Tata Cara Pemilihan Penyedia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
				- Berkas Rapat								
				- Pedoman Tata Cara Pemilihan Penyedia								
				- Nota Dinas								
				- Laporan								
			02.03	Pembuatan Pedoman Kontrak Katalog	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
				- Berkas Rapat								
				- Pedoman Kontrak Katalog								
				- Nota Dinas								
				- Laporan								
				- Draf <i>Standard Operasional Procedure</i> Penyusunan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Musnah					

PK	PENGELOLAAN SISTEM KATALOG										
	<b>PK 01</b>	Pengendalian Pengawasan Katalog									
		01.01	Pengelolaan Aplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
			- Berkas Rapat (Surat Undangan, Daftar Hadir, Notula)								
			- Laporan Proses Bisnis Aplikasi e-Katalog								
			- <i>User Guide</i>								
		01.02	Pengelolaan Produk	5 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
			- Surat Permohonan Penurunan/ <i>Update</i> / Pembatalan Paket Produk Barang/Jasa dari Penyedia								
			- Surat Pengaduan/Saran/Masukan								
			- Berkas Rapat (Surat Undangan, Daftar Hadir, Notula)								
			- Berita Acara								
			- Surat Peringatan								
			- Surat Tanggapan								
			- Laporan								
		01.02	Pelatihan dan/atau Sosialisasi	2 Tahun	-	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
			- Berkas Rapat (Surat Undangan, Daftar Hadir, Notula) Pelatihan Input Data ke Aplikasi								
			- Materi Pelatihan/Sosialisasi								
			- Laporan								
	<b>PK 02</b>	Evaluasi Katalog									
		02.01	Pembuatan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Katalog	5 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
			- Berkas Rapat								
			- Pedoman Pengelolaan Katalog								
			- Nota Dinas								
			- Laporan								

			02.02	Monitoring dan Evaluasi e-Katalog	2 Tahun	1 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
				- Surat Permohonan Data								
				- Laporan Jumlah Produk/Penyedia								
				- Laporan Survei Kesesuaian (Harga, Produk, Kesesuaian)								
				- Berkas Rapat (Surat Undangan, Daftar Hadir)								
				- Berita Acara								
				- Surat Peringatan								
				- Laporan Resume dari Data Jumlah Produk/Penyedia								
				- Laporan Hasil Evaluasi Etalase Produk Komoditi								
				- Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Katalog Elektronik								
				- Surat Tanggapan								
				- Nota Dinas								
				- Surat Aduan								
				<b>PA PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA</b>								
				<b>PA 01</b> Pengembangan Aplikasi Sistem Pengadaan								
			01.01	Inventarisasi Nama-nama Aplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
				- Daftar Fitur Aplikasi								
				- Petunjuk Penggunaan								
				- Daftar Nama Tabel								
				- Skenario <i>Testing</i>								
				- <i>Database Diagram</i>								
				- <i>Activity Diagram</i>								
				- <i>Class Diagram</i>								
			01.02	Uji Coba Aplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
				1) <i>Release Update</i>								
				2) <i>Release Aplikasi</i>								
				3) <i>Release Upgrade</i>								
			01.03	Pengadaan Konsultan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital

			01.04	Penyusunan <i>Information Technology Plan</i>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
			01.05	Penyempurnaan dan Finalisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
				- Ekspose								
				- Skenario <i>Testing</i>								
		<b>PA 02</b>	Pengembangan Teknologi, Informasi dan									
			02.01	Pemeliharaan Aplikasi	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
				- Pusat								
				- Daerah								
			02.02	Infrastruktur Teknis (server)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
				- Nonteknis (Kebijakan, Teknis, Tegulasi)								
			02.03	Monitoring	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
				- <i>Security</i>								
				- <i>Backup Data</i>								
				- <i>Cloud</i>								
			02.04	Pelayanan Aplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
				- Rutin (Identifikasi Forensik)								
				- Reguler (Pengaduan Kecurangan Pengadaan)								
		<b>PA 03</b>	Layanan Dukungan Sistem Pengadaan Secara									

			03.01	Bimbingan Teknis Evaluasi Layanan Dukungan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
			03.02	Manajemen Teknik Reguler	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
				- Sistem Pengadaan Secara Elektronik								
				- Regulasi								
				- Aplikasi								
			03.03	Manajemen <i>Technics Admin</i>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
			<b>PA 04</b>	Penyedia Terkualifikasi (Monitoring Evaluasi								
			04.01	Monitoring, Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional Persiapan Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
				- <i>Training International Organization for Standardization</i>								
				- Konsultasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
				- Pembinaan								
				- Regulasi								
				- Aplikasi e-Proc.lkpp.id								
			04.02	Pembinaan Penyedia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
			04.03	Media Campaign Penyedia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II			

SK	STANDAR KOMPETENSI DAN KELEMBAGAAN										
	<b>SK 01</b>	Standar Kompetensi									
		01.01	Kebijakan meliputi Peraturan serta Pedoman	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
			- Dokumen Surat Edaran								
			- Dokumen Keputusan								
		01.02	Inventarisasi Masalah Terkait Standar Kompetensi	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		01.03	Pembahasan Draf (Notula Rapat)	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		01.04	Laporan Tenaga Ahli/Konsultan Terkait Standar Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
	<b>SK 02</b>	Kelembagaan									
		02.01	Kebijakan Terkait Kelembagaan Meliputi Peraturan, Pedoman	5 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		02.02	Berkas Pengelolaan Data Pengembangan Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berupa Kerangka Acuan Kerja Tenaga Ahli	3 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
			- Laporan Tenaga Ahli								
			- Panduan Pengguna								
		02.03	Pembinaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	5 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

				-	Struktur dan Organisasi Tata Kerja yang Memuat Fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa								
				-	Bukti Dukung Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa								
				-	Berkas Surat Permohonan Pendampingan Tingkat Kematangan Unit								
				-	Laporan Pembinaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa								
				-	Surat Konsultasi dari kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Terkait Kelembagaan								
				-	Surat Jawaban Mengenai Konsultasi dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Terkait Kelembagaan								
				-	Surat Undangan								
				-	Materi Paparan								
				-	Notula								
				-	Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Monitoring Pengembangan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa								
			02.04		Kajian Terkait Kelembagaan	2 Tahun Setelah Kajian Diperbaharui	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
				-	Inventarisasi Masalah								
				-	Notula Rapat								
				-	Draf Kajian								
				-	Laporan Tenaga Ahli/Konsultan								

PG	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
	PG 01	Pengembangan Sumber Daya Manusia									
		01.01	Kebijakan Terkait Sumber daya Manusia meliputi Peraturan, Pedoman	5 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		01.02	Pengelolaan Data dan Penyusunan Rencana Kebutuhan	5 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
			- Surat Permohonan Rekomendasi Kebutuhan dan Lampiran Perhitungan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah								
			- Berkas Pengelolaan Data dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Persebaran Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah								
		01.03	Penilaian Angka Kredit	4 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
			- Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit								
			- Surat Penyampaian Berita Acara Penetapan Angka Kredit								
			- Berita Acara Penyampaian Angka Kredit								
			- Draf Penilaian Angka Kredit								
		01.04	Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Forum Komunikasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

				- Surat Undangan								
				- Materi Paparan								
				- Notula								
				- Kerangka Acuan Kerja Tenaga Ahli								
				- Laporan Tenaga Ahli								
				- Panduan Pengguna								
			01.05	Monitoring dan Evaluasi Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	4 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
				- Pedoman dan Instrumen Monitoring Evaluasi								
				- Lembar Monitoring, Kuesioner, dan/atau Interview								
				- Hasil dan Rekomendasi Monitoring Evaluasi								
			01.06	Kajian Terkait Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	3 Tahun Setelah Kajian Diperbaharui	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
				- Draft Final Kajian								
				- Notula Rapat								
				- Laporan Tenaga Ahli/Konsultan								
		<b>PG 02</b>	Pengembangan Sumber Daya Manusia Non									
			02.01	Kebijakan meliputi Peraturan dan Pedoman	5 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
			02.02	Kajian	3 Tahun Setelah Diperbaharui	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
				- Notula Rapat dan Draft Kajian								
				- Laporan Tenaga Ahli/Konsultan								



			-	Standar Penyusunan Dokumen								
			-	Instruksi Kerja								
		<b>SF 03</b>	Sarana Sertifikasi									
			03.01	Penyusunan Materi Uji Kompetensi dan Bank Soal	4 Tahun	2 Tahun	Musnah	Rahasia	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			03.02	Penyelenggaraan Peralatan Operasional Sertifikasi	4 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
		<b>SF 04</b>	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen									
			04.01	Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	3 Tahun Setelah Diperbaharui	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			04.02	Teknis Aplikasi Sertifikasi	3 Tahun Setelah Diperbaharui	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
		<b>SF 05</b>	Pembentukan dan Pembinaan Tempat Uji									
			05.01	Permohonan	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			05.02	Hasil Verifikasi ( <i>Check List</i> Verifikasi Tempat Uji Kompetensi dan Berita Acara Tempat Uji Kompetensi)	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			05.03	Data Pengawas Ujian dan Tempat Uji Kompetensi	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
		<b>SF 06</b>	Pembentukan dan Pembinaan Asesor									
			06.01	Riwayat Penugasan Asesor	3 tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			-	Surat Tugas Asesor								
			-	Dokumen Kelengkapan Uji Kompetensi								
			-	Berita Acara Rapat Pleno Sertifikasi								
		<b>SF 07</b>	Tata Kelola Sertifikasi									

			07.01	Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Tahun Setelah Penyelenggaraan	3 Tahun	Musnah, Kecuali Berita Acara dan Salinan Sertifikat Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
				- Surat Permohonan Penyelenggaraan Ujian								
				- Surat Tugas Pengawas								
				- Berita Acara Pengawasan Ujian								
				- Dokumen Pertanggungjawaban Pengawasan Ujian								
				- Daftar Presensi Peserta								
				- Daftar Foto Peserta								
				- Salinan Sertifikat								
				- Dokumen Pendukung Lainnya								
				- Jadwal Penyelenggaraan Ujian								
				- Rekaman <i>Closed Circuit Television</i>								
			07.02	Naskah-Naskah yang Berkaitan dengan <i>Database</i> Sertifikasi, Termasuk <i>Back-up</i>	10 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			07.03	Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Ujian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			07.04	Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pengawas Ujian (Audit)	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			07.05	Rekapitulasi Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Ujian	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			07.06	Jadwal Pengawasan Evaluasi	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			07.07	Data dan Hasil Analisis Psikometri	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi

			07.08	Riwayat Analisis Butir Soal	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			07.09	Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Berbasis Kompetensi	2 Tahun Setelah Penyelenggaraan	3 Tahun	Musnah, Kecuali Berita Acara dan Salinan Sertifikat Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
				- Surat Permohonan Penyelenggaraan Ujian								
				- Surat Tugas Asesor								
				- Berita Acara Pengawasan Ujian								
				- Dokumen Pertanggungjawaban Pengawasan Ujian								
				- Daftar Presensi Peserta								
				- Daftar Foto Peserta								
				- Salinan Sertifikat								
				- Formulir Pengawasan Ujian Kompetensi								
				- Dokumen Pendukung Lainnya								
				- Jadwal Penyelenggaraan Ujian								
				- Rekaman <i>Closed Circuit Television</i>								
		<b>SF 08</b>	Evaluasi									
			08.01	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Ujian	4 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			08.02	Laporan Semester, Triwulan, dan Tahunan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			08.03	Laporan Analisis Butir Soal	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
		<b>SF 09</b>	Surveilen									
			09.01	Jadwal Pengawasan Surveilen	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi

			09.02	Formulir Surveilen dan Dokumen Pendukung Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			09.03	Laporan/ <i>Feedback</i> Asesi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			09.04	Laporan Instansi	1 Tahun Setelah Disampaikan	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
			09.05	Laporan Semesteran dan Tahunan Surveilen	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Sertifikasi Profesi
<b>HS</b>	<b>HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH</b>											
	<b>HS 01</b>	Pemberian Advokasi										
			01.01	Surat jawaban Konsultasi kepada <i>Stakeholder</i> Terkait Proses Pengadaan Melalui Surat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	A. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat B. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
			01.02	Konsultasi kepada <i>Stakeholder</i> Terkait Proses Pengadaan Melalui Web	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	A. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat B. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
			01.03	Formulir Konsultasi kepada <i>Stakeholder</i> Terkait Proses Pengadaan Melalui Tatap Muka	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	A. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat B. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

			01.04	Bimbingan Teknis Seminar/ <i>Workshop</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	A. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat B. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		<b>HS 02</b>		Pendampingan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	A. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat B. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
			02.01	Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	A. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat B. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
			02.02	<i>Probity Advice</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	A. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat B. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
			02.03	Pendampingan Konsolidasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	A. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat B. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

		02.04	Manajemen <i>Advisor</i> Pengadaan Barang/Jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	A. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat B. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
	<b>HS 03</b>	Pengembangan Sistem Pelayanan									
		03.01	Sistem <i>Clearing House</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		03.02	Sistem Advokasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		03.03	Sistem <i>Probitiy Advice</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		03.04	Sistem Konsolidasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
	<b>HS 04</b>	<i>Procurement Knowledge Management</i>		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
	<b>HS 05</b>	Konsolidasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
	<b>HS 06</b>	Penyelenggaraan <i>Clearing House</i>		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	A. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat B. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
	<b>HS 07</b>	Penanganan Permasalahan Hukum									

			07.01	Seleksi Pemberi Keterangan Ahli	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
				- Surat Pengumuman								
				- Rekap Pendaftaran								
				- Pengawasan Seleksi								
				- Laporan Penilaian Hasil Seleksi								
			07.02	Surat Tugas Penugasan Ahli	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
			07.03	Layanan Keterangan Ahli	1 Tahun	4 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
				- Berita Acara Pemeriksaan								
				- Laporan gelar perkara								
				- Laporan persidangan								
			07.04	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterangan Ahli	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
			07.05	Seleksi Pemberi Keterangan Ahli	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
				- Surat Undangan								
				- Rekap Pendaftaran								
				- Laporan Pengawasan Peningkatan Kapasitas								
				- Laporan Penilaian Hasil Peningkatan								
			07.06	Peningkatan Kapasitas Ahli	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
				- Surat Undangan								
				- Rekap Pendaftaran								
				- Laporan Pengawasan Peningkatan Kapasitas								
				- Laporan Penilaian Hasil Peningkatan								

			07.07	Pengembangan Aplikasi Layanan Keterangan Ahli	Selama Dipakai	2 Tahun	Musnah, Kecuali Database Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
				- Aplikasi Layanan Keterangan Ahli								
				- Database Layanan Keterangan Ahli								
		<b>HS 08</b>	Konsultasi Permasalahan Kontrak									
			08.01	Konsultasi Permasalahan Kontrak	2 Tahun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
				- Surat Permintaan Konsultasi								
				- Surat Jawaban Pemberian Tanggapan Konsultasi								
			08.02	Peningkatan Kapasitas Eksternal	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
				- Surat Pengumuman dan Undangan								
				- Laporan Pengawasan								
				- Pelaporan Kegiatan								
			08.03	Peningkatan Kapasitas Internal	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
				- Surat Undangan								
				- Laporan Pengawasan								
				- Laporan Kegiatan								
			08.03	Monitoring Penanganan Permasalahan Kontrak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
				- Laporan Survei Peningkatan Kapasitas Biro Hukum								
				- Laporan Monitoring pengawasan kegiatan								
		<b>HS 09</b>	Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah									
					2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Biasa/Umum/Terbuka	Eselon II	Publik/Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

		<b>HS 10</b>	Layanan Penyelesaian Sengketa	2 Tahun Setelah Memperoleh Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap	8 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang menggangu kinerja LKPP	Direktorat Permasalahan Hukum
		<b>DL</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN</b>								
		<b>DL 01</b>	Materi Pelatihan/Program dan Kurikulum								
		01.01	Penyusunan Materi/Program Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Kurikulum, Buku Induk Peserta dan Daftar Peserta Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang menggangu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
			- Kurikulum								
			- Buku Informasi								
			- Buku Kerja								
			- Bahan Ajar/Slide								
			- Buku Induk Peserta								
			- Daftar Peserta								
			- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								
		01.02	Penyusunan Materi Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Kurikulum, Buku Induk Peserta dan Daftar Peserta Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang menggangu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
			- Kurikulum								
			- Buku Informasi								
			- Buku Kerja								
			- Bahan Ajar/Slide								
			- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								

			01.03	Penyusunan Materi Pelatihan Jabatan Fungsional Jenjang Pertama	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Kurikulum								
				- Buku Informasi								
				- Buku Kerja								
				- Bahan Ajar/Slide								
				- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								
			01.04	Penyusunan Materi Pelatihan Jabatan Fungsional Jenjang Muda	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Kurikulum								
				- Buku Informasi								
				- Buku Kerja								
				- Bahan Ajar/Slide								
				- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								
			01.05	Penyusunan Materi Pelatihan Jabatan Fungsional Jenjang Madya	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Kurikulum								
				- Buku Informasi								
				- Buku Kerja								
				- Bahan Ajar/Slide								

			01.13	Penyusunan Materi Pelatihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Kurikulum								
				- Buku Informasi								
				- Buku Kerja								
				- Bahan Ajar/Slide								
				- Pedoman Pelatihan								
				- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								
			01.14	Penyusunan Materi Pelatihan Desa, (Buku Informasi, Buku Kerja, dan Slide Bahan Ajar)	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Kurikulum								
				- Buku Informasi								
				- Buku Kerja								
				- Bahan Ajar/Slide								
				- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								
			01.15	Penyusunan Materi Revisi Materi Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Kurikulum								
				- Buku Informasi								
				- Buku Kerja								
				- Bahan Ajar/Slide								
				- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								

				- Bahan Ajar/ <i>Slide</i>								
				- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								
			01.08	Penyusunan Materi Pelatihan Manajemen Resiko dalam Pekerjaan Konstruksi	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Kurikulum								
				- Buku Informasi								
				- Buku Kerja								
				- Bahan Ajar/ <i>Slide</i>								
				- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								
			01.09	Penyusunan Materi Pelatihan Pengawasan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Kurikulum								
				- Buku Informasi								
				- Buku Kerja								
				- Bahan Ajar/ <i>Slide</i>								
				- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								
			01.10	Penyusunan Materi Pelatihan Berdasarkan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 2016	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Kurikulum								
				- Buku Informasi								

				- Buku Kerja								
				- Bahan Ajar/Slide								
				- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								
			01.11	Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Silabus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 2016	1 Tahun	3 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Kurikulum								
				- Buku Informasi								
				- Buku Kerja								
				- Bahan Ajar/Slide								
				- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								
			01.12	Penyusunan Kurikulum dan Silabus Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 2016	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Silabus								
				- Kurikulum								
				- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								
			01.13	Penyusunan Materi Pelatihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Kurikulum								
				- Buku Informasi								
				- Buku Kerja								
				- Bahan Ajar/Slide								

				- Pedoman Pelatihan								
				- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								
			01.14	Penyusunan Materi Pelatihan Desa, (Buku Informasi, Buku Kerja, dan Slide Bahan Ajar)	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Kurikulum								
				- Buku Informasi								
				- Buku Kerja								
				- Bahan Ajar/Slide								
				- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								
			01.15	Penyusunan Materi Revisi Materi Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Kurikulum								
				- Buku Informasi								
				- Buku Kerja								
				- Bahan Ajar/Slide								
				- Dokumen Pendukung Lainnya (Daftar Hadir, Undangan, Notula, Draf Modul, Keputusan Modul, Nomor <i>International Standard Book Number</i> , dan lain-lain.)								
			01.16	Dokumen Penyusunan Materi Pelatihan <i>e-Learning</i>	1 Tahun Setelah Diperbaharui	2 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II		Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Materi Pembelajaran								

		<b>DL 02</b>	Informasi Materi Pelatihan (Brosur, <i>Booklet</i> , <i>Leaflet</i> )	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
		<b>DL 03</b>	Evaluasi Pelatihan/Pemantauan dan Evaluasi								
			03.01 Monitoring dan Evaluasi Pelatihan	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
			03.02 Perencanaan Penyusunan Pedoman/Panduan	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
			- Undangan								
			- Daftar Hadir								
			- Notula								
			- Paparan Konsultan								
			03.03 Pedoman/Panduan Monitoring Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permenan	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
			- Formulir monitoring								
			- Rekap Data Hasil Monitoring dan Analisis Data								
			- Laporan Hasil Evaluasi								
			03.04 Pedoman/Panduan Monitoring Pelatihan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permenan	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
			- Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa								
			- Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jenjang Pertama								

				-	Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jenjang Muda								
				-	Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jenjang Madya (Formulir Monitoring, Rekap Data, Hasil Monitoring, Analisis Data Monitoring, serta Laporan Hasil Evaluasi)								
			03.05		Penyusunan Evaluasi Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa	1 Tahun	5 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				-	Formulir Evaluasi Pelatihan								
				-	Rekap Data Hasil Evaluasi dan Analisis Data Evaluasi								
				-	Laporan Hasil Evaluasi								
			03.06		Pedoman Evaluasi Pelatihan Keahlian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				-	Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa								
				-	Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jenjang Pertama								
				-	Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jenjang Muda								
				-	Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jenjang Madya								
				-	Meliputi Formulir Evaluasi, Rekap Data, Hasil Monitoring, dan Analisis Data Evaluasi, serta Laporan Hasil Evaluasi								

			03.07	Laporan Penyelenggaraan Pelatihan dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
		<b>DL 04</b>	Kajian									
			04.01	Kajian Efektivitas Pelatihan	1 Tahun	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Sosialisasi								
				- Laporan Kegiatan								
			04.02	Kajian Urgensi Pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Naskah Akademik								
				- Sosialisasi								
				- Laporan Kegiatan								
		<b>DL 05</b>	Sistem Manajemen Mutu Pusat Pelatihan dan Pendidikan Barang/Jasa									
				- Manual Mutu								
				- Manual Manajemen Risiko								
				- <i>Standart Operasional Prosedur</i>								
				- Hasil Internal Audit <i>Standardization Organization 900:2015</i>								
				- Hasil Tinjauan Manajemen								
		<b>DL 06</b>	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya									
			06.01	Sistem <i>e-Learning (Learning Management System)</i>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

			06.02	Sistem Informasi Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
			06.03	<i>Corporate University</i>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
			06.04	<i>Massive Open Online Course</i>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
		<b>DL 07</b>		Data Sistem Informasi Pelatihan	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Data Lembaga Penyelenggara Diklat								
				- Data Fasilitator								
				- Jadwal Pelatihan								
				- Data Program Pelatihan								
		<b>DL 08</b>		Lembaga Pelatihan								
			08.01	Penilaian (Akreditasi dan Surveiln)	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Dokumen Kegiatan Akreditasi dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan								
				- Surat Jawaban Permintaan Akreditasi								
				- Surat Tugas								
				- Instrumen Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan								

				- Foto Kopi Keputusan Akreditasi								
				- Berita Acara dan <i>Check List Assesment</i> Pendahuluan								
				- Berita Acara dan <i>Check List Assesment</i> Lapangan								
				- Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Akreditasi								
			08.02	Data Lembaga Penyelenggara Pelatihan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	-	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
		<b>DL 09</b>	Kerjasama Lembaga									
			09.01	<i>Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama LKPP dan Instansi lainnya</i>	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Kerangka Acuan Kerja Sama Lembaga								
				- Rencana Anggaran Biaya Kerja Sama Lembaga								
				- <i>Standart Operasional Prosedur Kerja Sama Lembaga</i>								
				- Laporan Kegiatan/Rapat/Perjalanan								
				- Surat Permintaan Kerja Sama								
				- Surat Jawaban Permintaan Kerja Sama								
				- Notula Rapat Kerja Sama								
		<b>DL 10</b>	Fasilitator Pengadaan									
			10.01	Pengajar Pelatihan/Fasilitator Meliputi Dokumentasi Kebijakan:	1 Tahun	5 Tahun	Musnah, Kecuali Master Permanen	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Surat Edaran								
				- Panduan								
				- Kerangka Acuan Kerja								

			10.02	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Fasilitator/ Narasumber	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Laporan Penyelenggaraan								
				- Soal Ujian <i>Training of Trainer</i>								
			10.03	Pengawasan Pengembangan Fasilitator	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Laporan Penyelenggaraan								
			10.04	Fasilitasi Pelatihan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
				- Surat Permohonan Fasilitator								
				- Surat Jawaban Fasilitasi								
				- Jadwal Pelatihan								
				- Surat Tugas Fasilitator								
			10.05	Data Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	2 Tahun	Musnah	Biasa/Umum/ Terbuka	Eselon II	Publik/ Masyarakat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LKPP	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI